

## **BAB III**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Analisis**

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan, demi mencapai kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program pemerintah mengenai wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun masih perlu ditingkatkan mengingat sampai dengan tahun 2003 masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan terutama pada keluarga kurang mampu adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung yang meliputi iuran sekolah, buku-buku, seragam dan alat tulis maupun biaya tidak langsung yang meliputi transportasi, biaya kursus, uang saku dan biaya lain-lain.

Pendidikan gratis adalah pendidikan dimana semua lapisan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu dapat melaksanakan kegiatan belajarnya dengan murah dan mudah yaitu mereka tidak harus membayar biaya-biaya yang dikelola oleh sekolah, misalnya uang SPP, uang pengembangan, uang pendaftaran, dan uang buku atau dapat dikatakan tanpa dipungut biaya. Yang dimaksud dengan pendidikan gratis atau sekolah gratis itu adalah orang tua tidak dipungut biaya khususnya biaya operasional, tapi biaya yang dipergunakan siswa harus dibiayai sendiri, misalnya buku, meskipun sudah

ada dana buku BOS tetapi masih menggunakan buku pendamping, buku-buku latihan atau LKS, dan seragam sekolah.

Tetapi pemahaman dari orang tua yang kurang, karena mereka menganggap yang dimaksud gratis itu adalah biaya secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan gratis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang kemudian di susul pemerintah pusat dengan jalan menaikkan biaya satuan BOS yang sangat signifikan.

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Aris Kepala Dinas PDDKN yang mengatakan bahwa:

*“Dalam mewujudkan pendidikan gratis di Kecamatan Cangkringan diperlukan sebuah karakteristik Good Governance. Kepala sekolah menjadi teladan bagi para guru, staf dan siswa, bahkan ada guru yang mengidolakan kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah juga berperan sebagai manajer, mengatur berbagai sumber daya untuk terealisasinya good governance di sekolah. Selain itu kepala sekolah juga memotivasi guru agar bias memberikan pendidikan yang layak untuk anak didik demi terwujudnya wajib belajar 9 tahun yang baik, guru juga senantiasa memberikan wawasan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan untuk generasi muda diharapkan dapat menekan tingkat anak yang tidak bersekolah.*

Jadi dalam hal ini kepala sekolah menjadi teladan bagi para guru, staf dan siswa, bahkan ada guru yang mengidolakan kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah juga berperan sebagai manajer, mengatur berbagai sumber daya untuk terealisasinya good governance di sekolah. Selain itu kepala sekolah juga memotivasi warga sekolah untuk terealisasinya *good governance*.

Peran guru yang muncul secara intens dalam implementasi good governance adalah sebagai pelaksana. Sedangkan peran sebagai pendorong dan pemikir mengenai bagaimana proses good governance dilakukan, masih belum diketahui dan masih belum muncul secara massif. Prediksi akan sebab dari masalah ini adalah karena asumsi guru yang menganggap bahwa tugasnya adalah melakukan pembelajaran, sehingga berbagai hal yang terkait dengan good governance, mereka lebih memilih menjadi pelaksana, karena kewajibannya menjadi tanggungan pimpinan sekolah beserta komite sekolah.

Komite sekolah berperan menjadi mediator, pengawas, pendukung, dan pemberi pertimbangan. Namun takarannya, keempat peran itu memiliki variasi tingkatan yang berbeda. Peran yang paling menonjol adalah komite sekolah sebagai pendukung dan pemberi pertimbangan terhadap penyelenggaraan sekolah. Pimpinan TU dan stafnya menganggap perannya dalam keberhasilan sekolah teramat penting, khususnya dalam penyediaan data dan informasi terkait dengan perencanaan, pembuatan keputusan, atau pembuatan laporan kegiatan. Adapun karakteristik *Good Governance* diantaranya seperti dijelaskan dibawah ini:

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Implementasi partisipasi masyarakat di SD Cangkringan 1 secara formal diwadahi melalui komite sekolah. Implementasi peran komite sekolah tidak saja sebagai penampung aspirasi, tetapi benar-benar menjadi mediator bagi masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah. Namun demikian dalam pelaksanaannya, belum semua unsur yang

berkepentingan dengan sekolah (stakeholder) berkontribusi dengan baik terhadap penyelenggaraan sekolah.

## 2. Tegaknya supremasi hukum

Penegakan supremasi hukum di SD Cangkringan 1 dianggap sebagai suatu hal yang penting oleh warga sekolah (kepala sekolah, guru-guru, staf sekolah, komite sekolah, dan siswa), dan kepala sekolah telah mengimplementasikan berbagai bentuk supremasi hukum dalam manajemen kelembagaan sekolah. Hal ini dirasakan memuaskan oleh para staf dan guru, termasuk oleh siswa. Namun demikian, ada dua hal yang menjadi catatan dalam penegakan supremasi hukum ini berdasarkan pengamatan selama penelitian, yaitu tidak ada slogan-slogan pemberitahuan di sekitar lingkungan sekolah dan menurut beberapa responden adanya kurang-sadaran guru untuk mengisi daftar hadir dan harus diingatkan oleh piket.

## 3. Transparansi

Implementasi transparansi di SD Cangkringan 1 tidak luput dari peran kepala sekolah dalam melakukan manajemen sekolah. Selain itu, dukungan dan tuntutan transparansi muncul dari stakeholder dan guru beserta staf sekolah. Hal inilah yang mendorong terimplementasinya transparansi pengelolaan sekolah, salah satu proses transparansi dilakukan melalui briefing hari senin (rutin setiap hari senin, pukul 07.15-07.45 dan upacara bendera, dimana segala informasi dan keluhan dapat disampaikan pada saat briefing berlangsung, sedangkan upacara menjadi

media antara pihak sekolah dengan siswa. APBS dan RPS sekolah tidak hanya diketahui oleh pihak sekolah, tetapi juga menjadi pegangan bagi para pengurus sekolah dan stakeholder sekolah. Dalam proses pembuatannya, APBS dikembangkan bersama antara pihak sekolah dengan komite sekolah, sedangkan RPS dikembangkan oleh sekolah.

#### 4. Peduli pada Stakeholder

Implementasi “peduli terhadap stakeholder” dapat dilihat pada layanan terhadap siswa, layanan terhadap orang tua, dan layanan terhadap masyarakat. Beberapa kondisi yang dapat diidentifikasi: Layanan ekstrakurikuler dan keseluruhannya aktif; Layanan kantin sebanyak 1 kantin berjajar rapi dan cukup nyaman; jumlah toilet sebanyak 3 toilet dan cukup bersih; mesjid cukup nyaman; lingkungan sekitar cukup bersih dan nyaman, banyak taman/tanaman-tanaman yang terawat dengan baik serta tidak ada sampah yang bergeletakkan; Dalam hal pelayanan terhadap tamu cukup baik, ramah, dan kekeluargaan. Orientasi layanan terhadap stakeholder menjadi salah satu orientasi dari kesja personil sekolah Namun demikian, orientasi ini belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak, apabila dilihat dari kondisi kaca-kaca kelas yang masih kotor selama proses PBM berlangsung.

#### 5. Berorientasi pada Konsensus

Pembuatan kesepakatan-kesepakatan antara kepala sekolah dengan guru dan staf sekolah merupakan bagian dari perilaku yang sudah biasa dilakukan. Media untuk membuat berbagai kesepakatan adalah briefing

hari senin setelah Upacara Bendera. Selain itu, berbagai kesepakatan pihak sekolah juga dilakukan dengan pihak stakeholder sekolah, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi komite sekolah. Rapat nitin pihak sekolah dengan komite sekolah dilakukan selama tiga kali dalam setahun, kecuali apabila terjadi kondisi yang emergent, seperti ketika sekolah diberikan tawaran untuk menjadi sekolah rintisan SSN, maka kepala sekolah secara langsung mengundang pengurus komite sekolah untuk mendiskusikannya. Berbagai kesepakatan pun terjadi antara guru dengan siswa. Rutinnya ini dilakukan di kelas dan di kegiatan upacara bendera. Di luar itu, kesepakatan dibuat berdasarkan pertemuan langsung guru dengan siswa.

#### 6. Kesetaraan

Kesetaraan berlaku dalam proses interaksi keseharian diantara warga dan sekolah. Demikian halnya perlakuan pimpinan sekolah terhadap warga minoritas. Hal ini dapat dilihat dari upaya sekolah untuk membujuk siswa yang berhenti sekolah, yang didasarkan pada keputusan pimpinan sekolah dan komite sekolah, siswa tersebut kembali ke sekolah dan mang tua hanya membayar semampunya Hal ini pun terjadi pada perlakuan terhadap guru honorer. Guru honorer diperlakukan dengan guru yang sudah menjadi PNS, termasuk dalam peningkatan kesejahteraannya. Kebijakan sekolah dan implementasinya tidak membeda-bedakan antara orang di dalam sekolah, bahkan didorong untuk terus memiliki kinerja yang lebih baik.

## 7. Efektifitas dan Efisiensi

Efektifitas dan efisiensi dilihat dari angka kenaikan kelas menunjukkan kondisi yang baik, tahun 2017 tidak ada yang tidak naik kelas dan serta tahun 2018. Dilihat dari tingkat kelulusan siswa, tahun 2017/2018 siswa yang mengikuti ujian sebanyak 41 orang lulus pada ujian. Dilihat dari prestasi non akademik, siswa-siswa banyak mendapatkan juara I baik pada level kabupaten, propinsi, maupun nasional. Setiap personil mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensinya. Walaupun ada yang mengajar dua mata pelajaran, tetapi guru tersebut memang kuliah pada dua disiplin ilmu yang berbeda. Dalam hal kinerja guru, kepala sekolah secara langsung mengamati dan membina penampilan guru di kelas dan dilakukan untuk semua guru.

## 8. Akuntabilitas

Dalam hal dana, akuntabilitas penggunaannya dilakukan kepada pihak pemberi dana. Akuntabilitas program dilakukan melalui pelaporan program, bahkan pengecekan hasil program. Akuntabilitas kerja dianggap penting oleh warga sekolah dalam manajemen sekolah. Pemahaman akuntabilitas terbatas pada pemberi dana atau pemberi program, sedangkan akuntabilitas terhadap siswa dan orang tua masih jarang dilakukan. Dalam hal ini mediasi melalui buku catatan belum

menjadi mediator kepada orang tua untuk memberikan informasi mengenai perkembangan anaknya.

#### 9. Strategis

Dalam perjalanannya sampai saat ini sekolah menyadari pentingnya. Dalam implementasinya, belum semua warga sekolah memahami dan mampu menjabarkannya dalam bentuk perilaku. Yang terjadi adalah warga sekolah memiliki keyakinan terhadap keberhasilan yang dicapai oleh sekolah. Optimisme disandarkan pada karakteristik kepala sekolah yang mampu mengembangkan sekolah pada kondisi yang seharusnya. Permasalahan yang sering dialami oleh warga sekolah adalah belum semua warga sekolah memahami visi dan misi sekolah, mengapa visi dan misi itu ada, dan apa pentingnya peran dia dalam pencapaian visi dan misi sekolah. Hal diidentifikasi disebabkan beberapa hal:

- a. Personil sekolah yang kurang berminat untuk membahas dan membicarakan akan hal-hal seperti ini. Bagi dirinya, yang penting adalah melaksanakan tugas.
- b. Proses penyusunan dan pengembangan visi sekolah ke depan yang tertuang dalam RPS tidak secara penuh melibatkan diri dalam pembahasannya

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa masih banyak anak usia sekolah khususnya di kabupaten Sukoharjo terutama dari kalangan ekonomi lemah yang belum dapat

mengenyam bangku sekolah ataupun yang terpaksa harus putus sekolah lantaran permasalahan klasik, yaitu tingginya biaya pendidikan sehingga dengan adanya kebijakan ini diharapkan semua anak di Kecamatan Cangkringan memperoleh kesempatan untuk bisa sekolah. Adapun yang harus dilakukan oleh sekolah adalah:

1. Persiapan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis

Persiapan yang dilakukan oleh pihak sekolah terutama dalam hal guru, siswa, sekolah dan orang tua. Pihak sekolah tidak henti-hentinya memberikan informasi dan sosialisasi kepada guru, siswa dan orang tua agar mereka tidak kaget dengan adanya kebijakan pendidikan gratis ini. Pihak sekolah harus menerima kebijakan pendidikan gratis ini karena mungkin dalam mengeluarkan biaya harus dipatok di dalam aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan tidak lagi menarik iuran dari komite atau wali murid. Untuk pihak siswa, orang tua dan guru diberi sosialisasi tentang kebijakan pendidikan gratis ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa yang dikatakan gratis adalah gratis dalam hal biaya operasionalnya.

Dalam rangka penyelenggaran pendidikan dasar 9 tahun, pemerintah, orang tua dan peserta didik juga mempunyai tanggung jawab terkait dengan biaya satuan pendidikan yang sudah diatur dalam PP No. 48 tahun 2008 yang harus dipahami betul. Intinya adalah bagi pemerintah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh

pemerintah sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan. Bagi siswa dan orang tua bertanggung jawab atas biaya pribadi siswa misalnya uang saku/ uang jajan, seragam sekolah dan lain sebagainya. Semua itu harus di pahami dan di persiapkan sedemikian rupa agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.

Dengan demikian, hal guru, siswa, sekolah dan orang tua dapat memahami bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada dalam buku pedoman pelaksanaannya.

## 2. Waktu pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis

Kebijakan pendidikan gratis merupakan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Sleman yang dimulai pada tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2019 ini disusul pemerintah pusat yaitu dengan adanya kenaikan biaya satuan BOS secara signifikan. Penyaluran dana program sekolah gratis baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan. Dana program gratis diberikan setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan, awal bulan setiap priode. Penyaluran dana dilaksanakan tim manajemen provinsi kepada tim manajemen kabupaten/kota melalui bank pemerintah/pos.

Guru di SD Cangkringan 1 Ibu Rosdiana menambahkan “*untuk tahun 2019 periode pertama sudah dimulai bulan Januari 2019 untuk semester 1 dan semester 1 tahun ajaran 2018/2019.*”

*Penyalurannya setiap periode dilakukan 3 bulan sekali pada awal bulan”.*

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis pada tahun anggaran 2019 akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2018, yaitu semester 2 tahun ajaran 2018/2019 dan semester 2 tahun ajaran 2019/2020.

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan atau triwulan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-September. Penyaluran juga diharapkan dilakukan di bulan pertama setiap triwulannya.

### 3. Implementasi kebijakan pendidikan gratis di SD Cangkringan 1

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar setelah semua pihak sudah mampu melaksanakan persiapan-persiapan yang harus dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kebijakan pendidikan gratis adalah untuk menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah baik di sekolah negeri maupun swasta, menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SM negeri terhadap biaya operasional sekolah kecuali pada rintisan RSBI dan SBI, meringankan beban biaya operasional bagi siswa di sekolah swasta.

Pihak sekolah wajib menggunakan dana yang sudah diterima tersebut untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), pembelian buku

teks pelajaran, biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya perawatan operasional sekolah. Sedangkan biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memiliki biaya besar, seperti: studytour (karyawisata), studi banding, pembelian seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak mendukung kegiatan sekolah, semuanya tidak ditanggung biaya BOS. Dan pemungutan biaya tersebut juga akan tergantung dengan kebijakan tiap-tiap sekolah.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu Guru di SD Cangkringan 1 Ibu Rosdiana yang mengatakan:

*Dengan adanya kebijakan itu, sekolah-sekolah di sukoharjo agak klabakan pada awalnya. Mereka bingung bagaimana harus melaksanakannya, padahal dulu bisa menarik dana dari orang tua atau komite tapi sekarang sudah tanpa pungutan dari mana-mana. Dan itu saja kapan keluar dananya tidak cetho atau tidak tepat waktu, jadi ya harus ngutang-ngutang dulu atau gimana caranya untuk menutup dulu untuk operasional, padahal kadang dana yang keluar itu lebih sedikit daripada dana yang pinjam itu. Jadi, yang paling penting dengan adanya pendidikan gratis itu sekolah harus pandai-pandai memanage, kalau tidak begitu sekolahan ya tidak mungkin jalan. Pihak sekolah menggunakan dana yang sudah diterima tersebut untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), pembelian buku teks pelajaran, biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya perawatan operasional sekolah.*

Hal ini tentunya pemerintah akan terus mengawasi dan menjamin agar biaya-biaya tersebut tidak memberatkan para siswa dan orangtua. Penyaluran dana program sekolah gratis pada mulanya dilakukan oleh tim manajemen provinsi/ kabupaten/ kota dengan mengajukan surat

penyediaan dana (SPD) ke biro/ bagian keuangan sekretaris provinsi/ kabupaten/ kota sesuai ketentuan.

Setelah SPD terbit, tim manajemen provinsi/ kabupaten/ kota mengajukan surat permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) dana sekolah gratis sesuai kebutuhan. Dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota melakukan verifikasi SPP-LS kemudian menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPM-LS). Surat itu ditujukan kepada biro/ bagian keuangan Setda provinsi/ kabupaten/kota. Biro/ bagian keuangan Setda provinsi/ kabupaten/ kota melakukan verifikasi SPM-LS.

Kemudian menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening kas daerah. Selanjutnya, dana sekolah gratis yang telah dicairkan dari biro/ bagian keuangan setda provinsi/ kabupaten/ kota disalurkan ke sekolah/ madrasah/ ponpes yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi/ kabupaten/ kota dan lembaga penyalur. Setidaknya ada tiga tim yang mengawasi pelaksanaan sekolah gratis ini yaitu tim manajemen provinsi, tim manajemen kabupaten/kota dan tim manajemen sekolah/ madrasah/ ponpes.

Semua pembukuannya harus disesuaikan dengan aturan dari pemerintah. Dana BOS berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan meliputi penyalran, pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi penyusunan laporan pertanggungjawabannya harus disusun secara lengkap dan tertata rapi. Jadi pertanggungjawaban dana harus

membutuhkan pengelolaan yang ekstra hati-hati karena dalam menyusun laporan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah, karena dana BOS merupakan bagian dari APBN.

#### **B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Serta Upaya Yang Dilakukan Dalam Menerapkan Program Pendidikan Gratis Di Kecamatan Cangkringan.**

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis secara umum di SD Cangkringan 1 Sleman sudah dapat berjalan dengan cukup baik, meskipun demikian masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan membutuhkan upaya untuk mengatasinya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada waktu pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban**

Kendala ini bersifat intern bagi sekolah terutama bagi pengelola dana BOS dalam menyusun laporan pertanggungjawaban BOS. Hal ini disebabkan karena persepsi yang kurang sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kadang dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya terdapat kekeliruan. Kondisi ini ditambah dengan semakin singkatnya waktu penyusunan pertanggungjawabannya.

Penyusunannya membutuhkan pemikiran yang teliti dan harus ditambah dengan jangka waktu yang sangat singkat padahal laporan

pertanggungjawaban tersebut harus didukung dengan data-data yang lengkap dan jelas. Informan M menambahkan bahwa dalam penggunaan dana itu sangat dibatasi untuk hal apa saja, padahal kenyataannya banyak pengeluaran yang tidak sesuai dengan batasan-batasan penggunaan dana tersebut dan pertanggungjawabannya juga harus sesuai dengan batasan-batasan yang terdapat dalam aturan di buku pedoman pelaksanaan pendidikan gratis itu. Berdasarkan uraian tersebut, maka kesulitan dalam laporan pertanggungjawaban merupakan kendala yang utama di dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis.

Kesulitan ini dapat dipengaruhi karena singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban BOS, kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan batasan yang sudah diatur di dalam buku pedoman.

## 2. Kesibukan Orang Tua

Orang tua dapat mendorong semangat siswa dalam meningkatkan motivasi belajar, karena adanya kepedulian wali murid (keluarga) yang terlibat aktif dalam pendidikan akan tercipta kondisi yang aman dan nyaman di sekolah. Keterlibatan orang tua efektif dalam meningkatkan kinerja sistem pendidikan. Keseluruhan proses pendidikan akan berlangsung dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Proses itu adalah

proses belajar bagi peserta didik yang akan menjadi manusia Indonesia yang tangguh.

*Seperti yang dijelaskan oleh salah satu guru SMP 1 Cangkringan Ibu Rosdiana “Saat ini banyak orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk membimbing dan mengawasi anak dalam belajar. Orang tua sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, banyak orang tua yang kurang mengawasi pergaulan dan kegiatan anak di luar rumah.*

Kurangnya perhatian orang tua kepada anak juga terlihat dari minimnya komunikasi orang tua dengan pihak sekolah, kepada wali kelas maupun Guru, orang tua datang ke sekolah hanya satu tahun sekali saat mengambil rapor saja. Bahkan ada pula orang tua yang tidak datang saat menerima surat panggilan atau undangan dari sekolah dengan alasan bekerja.

### 3. Kurangnya Motivasi dari Orang Tua.

Sinergi antara keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan gabungan yang tidak terpisahkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Keluarga adalah pusat pendidikan pertama yang ditemui oleh setiap anak manusia. Sekolah adalah pusat pendidikan kedua bagi anak bangsa sebagai bekal untuk memakmurkan tanah kelahiran. Hidup bermasyarakat adalah pusat pendidikan ketiga untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh di bangku sekolah maupun keluarga.

Ketika Kebijakan pendidikan Gratis mulai diberlakukan muncul pandangan pro dan kontra. Masing-masing pandangan memiliki argumentasi pembedaan yang berbeda-satu dengan lainnya. Demikian

pula muncul persepsi yang beragam dari kalangan masyarakat maupun para pembuat kebijakan dari propinsi hingga kabupaten/kota.. Selain itu yang lebih parah lagi kebijakan pendidikan gratis menjadi konsumsi bagi para kandidat Bupati/walikota, maupun gubernur dalam kampanyenya dengan mengangkat tema pokok pendidikan gratis sebagai janji-janjinya

Banyaknya fenomena ini tentu dalam prakteknyapun banyak terjadi kesenjangan dan penyimpangan dilapangan. Banyak ditemukan fakta dilapangan ternyata banyak sekolah-sekolah di pendidikan tetap menarik biaya peserta didiknya dengan berbagai alasan. Memang sekolah tidak langsung memintapada peserta didiknya maupun pada orang tuanya, akan tetapi sekolah menggunakan alat komite sekolah yang nota bene sebagai corong dari orang tua para peserta didik.

Logikanya komite sekolah membawa aspirasi para orang tua peserta didik, tetapi kenyataannya itu hanya sebatas teori saja, karena kenyataannya justru komite sekolah selalu mendukung keinginan sekolah yang ujungujungnya menjadi sasaran para orang tua peserta didik dibebani beraneka ragam biaya. Kebijakan pendidikan gratis di pendidikan, perlu digali pemaknaan yang benar, yakni gratis itu untuk siapa? Karena di lapangan ternyata gratis untuk semua peserta didik tanpa memandang status sosial ekonomi, status jabatan, sehingga sanga anak camat, bupati, gubernur, rektor, para pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatifpun putera-puterinya ikut menikmati.

Dalam praktek yang demikian inilah sebenarnya perlu dikaji ulang kebijakan pendidikan gratis agar tepat sasaran. Karena itu perlu dilakukan setting ulang untuk membnetuk pola baru mengenai operasionalisasi kebijakan pendidikan gratis di jenjang pendidikan menengah atas. Kebijakan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan harus disertamertai sanksi hukum jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya baik disengaja maupun tidak. Dengan sanksi hukum ini dimaksudkan untuk memberi jera bagi yang coba-coba bermain dengan pendidikan gratis. Pemberian sanksi hokum sangat perlu hal ini berkaitan mentalitas sebagian pejabat yang memiskinkan diri demi mendapatkan kegratisan dari pemerintah dalam segala aspek dan bidangnya.

4. Anggapan masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya

Pandangan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan gratis ini pada awalnya sangat senang sekali karena membantu seluruh biaya pendidikan, baik operasional maupun non operasional atau pribadi. Jadi mereka menganggap bahwa dengan adanya pendidikan gratis, orang tua sudah tidak membayar semua keperluan di dalam pendidikan anaknya sampai dengan keperluan pribadi siswa seperti seragam sekolah. Padahal yang dimaksud gratis disini adalah mengenai pembiayaan seluruh kegiatan operasional seperti SPP, biaya dari komite atau dana pembangunan, pembiayaan dalam rangka penerimaan siswa baru mulai

dari biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, daftar ulang, fotocopy panitia, konsumsi panitia, uang lembur panitia dan lain sebagainya.

Begitu pula untuk biaya penunjang kegiatan belajar mengajar mulai dari pembelian buku referensi dan buku teks pelajaran koleksi di perpustakaan. Informan M menambahkan bahwa sebagian masyarakat masih belum begitu mengerti dengan seksama yang dimaksud dengan pendidikan gratis disini, karena sosialisasi dari pemerintah untuk masyarakat tentang pelaksanaan pendidikan gratis ini serta aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pandangan yang keliru tentang kebijakan pendidikan gratis itu adalah gratis secara penuh, padahal pendidikan gratis itu ditujukan untuk menggratiskan biaya operasional saja sehingga membantu meringankan biaya pendidikan orang tua. Hal ini disebabkan karena kurang tahunya masyarakat dengan apa yang dimaksud dengan gratis dalam pendidikan gratis disitu.

Berbagai masalah yang muncul menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SD Cangkringan 1 sehingga perlu dicari jalan keluarnya agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya yaitu sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu.